



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA PEMBAHASAN  
DAFTAR INVENTARIS MASALAH (DIM) FRAKSI-FRAKSI ATAS  
RUU TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN**

**TANGGAL 14 SEPTEMBER 2016**

---

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 8 (delapan).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Rabu, 14 September 2016.
P u k u l	: 14.00 WIB s/d 14.50 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a	: Presentasi Tim Ahli terkait dengan kompilasi Daftar Inventaris Masalah (DIM) Fraksi-Fraksi atas draft RUU tentang Kekearantinaan Kesehatan
Ketua Rapat	: Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: 35 orang, izin 5 orang dari 73 orang Anggota.

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pembahasan DIM Fraksi-Fraksi atas draft RUU tentang Kekearantinaan Kesehatan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, SH., M.Hum.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.00 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Tim Ahli untuk mempresentasikan kompilasi DIM yang telah dibuat.

## **II. POKOK PEMBAHASAN**

- A. Presentasi dari Tim Ahli Badan Legislasi DPR RI terkait dengan Kompilasi DIM Fraksi-Fraksi, sebagai berikut:
  1. Badan Legislasi telah mengkompilasi DIM RUU tentang Kekearantinaan Kesehatan dari 10 (sepuluh) Fraksi di DPR RI.

2. Jumlah DIM seluruhnya sebanyak 519 DIM yang dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu DIM yang bersifat tetap, perubahan redaksional, perubahan substansi, substansi baru, dan dihapus.
3. Tim Ahli juga telah melakukan menginventarisir isu-isu yang kiranya dapat dianggap krusial dalam pembahasan RUU tentang Keekarantinaan Kesehatan, diantaranya :
  - Terkait dengan judul RUU;
  - Definisi Keekarantinaan Kesehatan;
  - Masuknya substansi bioterorisme dalam definisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
  - Tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - Hak masyarakat dalam keekarantinaan kesehatan;
  - Kewajiban setiap orang dalam keekarantinaan kesehatan; dan
  - Kelembagaan.

B. Pandangan/tanggapan Anggota terhadap kompilasi DIM RUU tentang Keekarantinaan Kesehatan, sebagai berikut :

1. Terhadap hasil kompilasi DIM dari Fraksi-Fraksi di DPR RI, kiranya perlu dilakukan penyisiran kembali, hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa perbedaan dengan DIM yang diusulkan oleh Fraksi.
2. Kompilasi DIM kiranya telah memasukan semua usulan DIM yang diajukan oleh Fraksi, namun kiranya penomoran terhadap DIM kompilasi dapat dirapihkan kembali untuk memudahkan Anggota dalam membaca DIM tersebut.
3. Mengusulkan agar Pasal 10 draft RUU tentang Keekarantinaan Kesehatan usul Fraksi PKS dapat menjadi salah satu isu krusial.
4. Menugaskan kepada TIM ahli untuk melakukan pendataan secara lebih teliti terkait dengan pengelompokkan DIM-DIM tersebut.

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Keekarantinaan Kesehatan dari Fraksi-Fraksi, menyetujui/menyepakati untuk menugaskan kepada Tim Ahli melakukan penyempurnaan dan perbaikan dalam penyusunan DIM untuk mempermudah Anggota dalam melakukan pembahasan RUU.

Rapat ditutup pukul 14.50 WIB.

Jakarta, 14 September 2016  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001